

Pengaruh Sertifikasi Pariwisata terhadap Peluang Kerja di Industri Pariwisata

Herbin Saragi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia

Email: herbin_saragi@yahoo.com

Abstrak

Di Era Generasi milenial tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi digital, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan bisnis. Oleh karena SDM Pariwisata harus memahami pentingnya persaingan dunia kerja setelah lulus dari dunia pendidikan. Oleh karena itu lahirlah sertifikasi pariwisata sebagai upaya peningkatan kualitas SDM tersebut. Namun dalam peningkatan tersebut muncul permasalahan yakni apakah keberadaan sertifikasi pariwisata ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan peluang kerja bagi tenaga kerja di industri pariwisata. Penelitian ini menjawab persoalan tersebut melalui metode penelitian kualitatif dengan study literatur. Peneliti mengambil beberapa informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Hal itu berguna sebagai perbandingan, baik itu kekurangan atau kelebihan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pengaruh yang signifikan terhadap peluang kerja yakni pengaruh mikro dan pengaruh makro. Dimana pengaruh mikro ini berhubungan dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan pengaruh makro berhubungan dengan sistem industri pariwisata dalam peningkatan perekonomian.

Kata Kunci: *uang Panai, Status Sosial, Perkawinan.*

Abstract

Culture is a communication that is obtained from knowledge of the customs and habits of the community. Panai money is a cultural tradition of the Bugis tribe where the man gives money to the women where the money is used for shopping for wedding needs. In addition, this tradition of panai raises a lot of cultural perspectives, because it contains understanding or knowledge and reality. The purpose of this study was to determine the cultural perspective of panai and the marital social status of the bugis bone tribe in Palembang. The theory used in this research is social construction theory. This research method uses a qualitative descriptive method, namely data collection using observation, interviews, documentation. The result of the research that has been carried out are the social status of the Bugis ethnic marriage which affects the high and low of panai money, the social status itself includes heredity, physical condition, education, work, and the women's economy. Panai money has been considered as a women's self-esteem, therefore panai money is a real phenomenon in people's social knowledge.

Keywords: *panai money, social status, marriage.*

PENDAHULUAN

Peradaban moderen membawa manusia dalam perkembangan yang sangat cepat, ditambah dengan meningkatnya dunia digital sekarang ini. Perkembangan ini membawa pengaruh besar terhadap aspek kehidupan manusia baik dibidang jasa maupun non jasa. Perkembangan dunia yang

pesat ini membawa konsekuensi terhadap perubahan dan adaptasi beberapa profesi di dunia. Dimana profesi ini memberikan dampak dan pengaruh yang luas terhadap profesionalitas dari profesi itu sendiri. Tak terkecuali dalam dunia pariwisata. (Nuzulian, 2020) Di Era Generasi milenial tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi digital, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan bisnis. Oleh karena SDM Pariwisata harus memahami pentingnya persaingan dunia kerja setelah lulus dari dunia pendidikan. Era ini bukan hanya ijazah yang diminta, namun permintaan industri pariwisata semakin meningkat yaitu dengan adanya SDM dibekali dengan kompetensi. Agar dapat berlomba-lomba diakui dalam bisnis serta mendapatkan kedudukan yang unggul pada persaingan ekonomi dunia pada sekarang ini. (Keliat, 2014)

Pencari kerja diminta menyiapkan sertifikat kompetensi agar kompetitif menghadapi persaingan dunia kerja. Sebab, standar kompetensi sangat dibutuhkan perusahaan. Kriteria itu bahkan sudah diberlakukan sebagai syarat pencari kerja pada lowongan atau posisi tertentu. (Oktavia, 2019) Mendasari hal itu, dunia pendidikan diminta membuat skema atau menyiapkan kurikulum sesuai dengan harapan industri pariwisata untuk dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu dalam pelaku industri pariwisata, uji kompetensi sangat dibutuhkan agar setiap karyawan memiliki standar kemampuan sesuai bidang masing-masing dalam memberikan pelayanan bagi tamu hotel dan restoran. Selain itu sertifikat kompetensi sebagai bukti dasar tertulis kualitas profesionalitas seseorang dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya.

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang menjadi ujung tombak dalam operasional perusahaan. Pada usaha pariwisata, sumber daya manusia adalah sangat penting karena berhadapan langsung dengan konsumen atau pihak pelanggan, yang mana sifat dari pelayanan pariwisata tidak bisa dipindahkan ataupun diulang. Sehingga sumber daya manusia pariwisata dituntut untuk benar-benar memiliki kemampuan kompetensi sesuai bidangnya. Pengembangan sumber daya manusia adalah syarat yang harus dipenuhi saat membangun atau mengembangkan suatu destinasi wisata. Dalam pembahasan para Menteri Pariwisata negara-negara APEC telah berkomitmen bahwa untuk mewujudkan pembangunan wisata yang berkelanjutan maka harus berinvestasi di bidang sumberdaya manusia. Untuk meningkatkan daya saing di sektor sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pelatihan serta melanjutkan program sertifikasi bagi pekerja bidang pariwisata. (Aneldus, 2020)

Sejak ASEAN mendeklarasikan diri masuk dalam tahap integrasi ekonomi salah satu proyeksi utama adalah liberalisasi jasa. Terdapat dua fungsi liberalisasi jasa di ASEAN yakni meningkatkan integrasi wilayah dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Salah satu sektor yang cukup penting dalam liberalisasi jasa adalah pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor penting di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini didorong oleh letak geografis kesepuluh negara anggota yang beragam dan mengundang ketertarikan dari wisatawan untuk melancong ke ASEAN. Jumlah wisatawan yang masuk ke kawasan secara masif mendorong pemasukan bagi kawasan, misal pada tahun 2015 sektor pariwisata tercatat mampu menyumbang GDP kawasan sebesar 12,4%. (Rahmadhany, 2019) Selain itu sektor pariwisata mampu menyerap 30 juta pekerja atau setara dengan 1 dari 10 pekerja di ASEAN (Nizal, 2019)

Melihat data di atas maka sektor pariwisata khususnya di Indonesia memiliki potensi besar dalam hal penggerak ekonomi. Oleh karena itu perlu perhatian khusus dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri pariwisata. Salah satu instrumen yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan adalah adanya sertifikasi pariwisata. Dimana sertifikasi pariwisata ini berlaku bagi tenaga kerja di sektor pariwisata itu sendiri. Misalnya seperti pemandu wisata dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berfokus pada persoalan bagaimana

implementasi sertifikasi pariwisata di Indonesia serta bagaimana pengaruh sertifikasi pariwisata terhadap peluang kerja di industri pariwisata itu sendiri. Dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis akan menyajikan beberapa khazanah mengenai literatur mengenai sertifikasi pariwisata, tenaga kerja di industri pariwisata, dan perekonomian industri pariwisata. Dimana literatur tersebut akan menjadi landasan penulis dalam menganalisa bagaimana sebenarnya implementasi sertifikasi pariwisata dalam mempengaruhi tenaga kerja dalam industri pariwisata itu sendiri.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan study literatur. Peneliti mengambil beberapa informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Hal itu berguna sebagai perbandingan, baik itu kekurangan atau kelebihan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. (Lincoln, 2018)

Dalam penelitian ini penulis menganalisa implementasi terhadap sertifikasi pariwisata di Indonesia dan pengaruh sertifikasi pariwisata dalam perkembangan tenaga kerja dalam meningkatkan tenaga kerja dalam industri pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian di Indonesia. Dimana dengan metode kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Pariwisata

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya peningkatan SDM ini menunjang peningkatan profesionalitas dan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam sektor pariwisata. Dimana pariwisata sebagai salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia harus diberikan perhatian lebih. Khususnya dalam hal metode metode dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan Indonesia.

Oleh karena itu perlu pemberian sertifikasi pariwisata dalam memberikan kualifikasi yang jelas dan terukur sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap perekonomian pariwisata. Sertifikasi ini pada dasarnya merupakan bentuk pelatihan serta uji kompetensi kemampuan seseorang dalam dalam kategori tertentu. Misalnya dalam sektor hubungan industrial, dimana seseorang dapat dikatakan sebagai seorang profesional di dalam hubungan industrial maka ia harus mengikuti rangkaian uji kompetensi sebagai analis hubungan industrial. Dimana uji kompetensi ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dikelola oleh lembaga tertentu dalam sebuah institusi dengan izin oleh Pemerintah.

Dalam konteks sertifikasi pariwisata, kita berfokus pada sertifikasi profesi dalam bidang pariwisata, misalnya profesi pemandu wisata, team leader, atau bahkan usaha dalam bidang pariwisata. Dimana keberadaan sertifikasi ini akan memberikan penilaian terhadap kompetensi tenaga kerja dalam industri pariwisata. Dalam pelaksanaan uji kompetensi ini maka ada standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku industri pariwisata itu sendiri. Dimana ketika seseorang mengikuti sertifikasi pariwisata dan dinyatakan lulus, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai profesional dan berkualifikasi sebagai tenaga kerja dalam industri pariwisata. Dalam prespektif konsumen, sertifikasi pariwisata ini memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen untuk melakukan kerja sama dalam sektor pariwisata. (Spillane, 2019)

Dimana kepercayaan ini disebabkan adanya sertifikasi yang ditujukan ke konsumen. Dalam hal ini konsumen lebih merasa aman, tenram dan berfikir bahwa barang atau jasa yang ditawarkan dalam

industri pariwisata ini benar benar teruji kualitasnya. Sehingga ini akan menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Selain itu pemberian sertifikasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku industri pariwisata. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

Dimana dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Pun demikian jika kita Mengacu pada UU No. 10 2009 Tentang Kepariwisata bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan para pekerja pariwisata untuk menguji kompetensi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisata wajib memperkejakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat Kompetensi di Bidang Pariwisata. (Nurnangtyas, 2021)

Pemberian sertifikasi pariwisata ini merupakan bentuk pengujian terhadap kompetensi para pelaku industri pariwisata. Dimana pengujian ini akan menambah kualitas dan kapabilitas pelaku pariwisata itu sendiri. Dimana ketika ia mampu dan lulus uji kompetensi maka dapat dinyatakan sebagai seorang profesional dalam bidang pariwisata. Sehingga ini akan menjadi stimulus bagi roda perekonomian, karena dari sisi konsumen adanya sertifikasi ini memberikan rasa aman dan percaya terhadap pelaku industri pariwisata.

Tenaga Kerja di Industri Pariwisata

Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan perjanjian terhadap pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja menegaskan bahwa tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemahaman mengenai tenaga kerja diatas juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Payaman Simanjuntak bahwa tenaga kerja merupakan seseorang atau penduduk yang bekerja atau mencari kerja, dimana mereka ini sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan tertentu baik di bidang apapun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tidak semua orang juga dapat disebut sebagai tenaga kerja, hal ini dibatasi dengan usia tertentu yang diperbolehkan secara hukum untuk bekerja. Dimana dalam konteks ini Indonesia memiliki klasifikasi yang berbeda dalam penerapan usia cakap kerja, hal ini dikarenakan dalam konsepsi hukum ada klasifikasi dewasa yang berbeda. Dalam hukum perdata misalnya, seseorang dapat dikatakan dewasa dan cakap hukum apabila telah memasuki umur 21 tahun. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, seseorang dapat disebut cakap hukum ketika telah memasuki usia 18 tahun. (Tobing, 2018)

Dua penerapan ini juga berpengaruh pada usia minimal seseorang diperbolehkan bekerja secara hukum. Berdasarkan dua klasifikasi tersebut penulis mengambil jalan tengah bahwa secara kemampuan dan pengetahuan setidaknya seseorang haruslah berusia 18 tahun untuk dapat melakukan perjanjian kerja kepada pihak tertentu. Terlebih dalam sektor pariwisata, haruslah ada ketentuan yang jelas berapa usia minimal seseorang dapat mengikuti sertifikasi pariwisata sehingga dianggap mampu sebagai tenaga ahli dalam sektor pariwisata. (Santoso, 2021)

Banyak sekali aspek tenaga kerja dalam sektor pariwisata, baik dari perhotelan, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan lain sebagainya. Dengan banyaknya klasifikasi tenaga kerja di sektor

pariwisata ini maka diperlukan juga standarisasi sertifikasi pariwisata sesuai dengan aspek dalam pariwisata itu sendiri. Dimana peran ini dapat meningkatkan mutu kerja para tenaga kerja di industri pariwisata itu sendiri. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Sebagaimana disebutkan oleh Adam Smith, bahwa terdapat fakta yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adanya pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Dimana pertumbuhan penduduk ini berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja. Maka dengan memberikan sertifikasi pariwisata, berarti memberikan stimulus kualitas industri pariwisata meningkat. Dengan peningkatan kualitas ini maka akan lebih menyerap tenaga kerja dalam sektor pariwisata dan akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Perekonomian Industri Pariwisata

Kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya. (Redata, 2021)

Perkembangan perekonomian merupakan jantung terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Tanpa perekonomian yang stabil maka negara akan bangkrut dan tidak mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Mengingat letak geografis Indonesia sangatlah strategi yang terdiri dari beberapa kepulauan yang dikelilingi lautan yang indah. Potensi geografis ini haruslah dimanfaatkan secara baik dalam menarik para wisatawan lokal maupun internasional untuk datang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia. Dengan banyaknya para wisatawan ini nantinya maka akan memberikan stimulus perekonomian dan menciptakan roda perekonomian bagi industri pariwisata di Indonesia.

Jika kita melihat data dari World Travel and Tourism Council bahwa kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB pada tahun 2014 berkisar pada angka Rp. 325.467 miliar atau sekitar 3,2% dari PDB. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhannya meningkat menjadi 6.0% yakni menjadi Rp. 345.102 miliar. (Renata, Indonesia.gi.id, 2019) Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam menyumbang PDB Indonesia. Selain itu pertumbuhan perekonomian tersebut juga menyerap tenaga kerja secara masif. Misalnya juga pada tahun 2018 kita melihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 13,2 %. Perkembangan jumlah pariwisata ini menunjukkan bahwa besar sekali kontribusi pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan tersebut maka perlu perbaikan dalam seluruh elemen sirkulasi industri pariwisata ini. Dimana pertumbuhan perekonomian pariwisata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga, pendapatan, kepadatan penduduk, situasi sosial, politik, dan profesionalitas pelaku industri pariwisata. (Frideman, 2020) Dalam hal peningkatan profesionalitas ini salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi implementasi sertifikasi pariwisata di Indonesia. Ini berhubungan dengan faktor peningkatan permintaan pariwisata diatas, dimana faktor faktor itulah yang harus dioptimalisasi guna memberikan peningkatan yang lebih dalam hal pertumbuhan ekonomi.

Sertifikasi pariwisata ini dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah sebagai pengawas dan

institusi resmi yang menjamin bahwa pariwisata di Indonesia lebih aman, terpercaya dan profesional. Hal ini tentu saja akan mendapatkan attention dari konsumen pariwisata. Dimana konsumen akan melihat keseriusan pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia. Salah satu kunci dari industri pariwisata adalah insfrastruktur dan kepercayaan. Dimana kepercayaan akan dibangun dan dikuatkan melalui implementasi sertifikasi pariwisata ini. Sedangkan insfrastruktur akan dibangun sesuai dengan kebutuhan pariwisata itu sendiri. Dimana kedua hal tersebut haruslah berjalan beriringan. Tidak bisa dijalankan secara sepihak, karena pembangunan insfrastruktur saja tanpa pembangunan SDM melalui sertifikasi pariwisata maka akan menurunkan kepercayaan dan kualitas pelaku industri pariwisata. Sebaliknya pun begitu, pelaksanaan sertifikasi pariwisata dan tanpa pembangunan insfrastruktur maka akan menurunkan minat wisatawan dikarenakan kesulitan akses pariwisata tersebut.

Dengan melihat perkembangan industri pariwisata di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonseisa ternyata cukup besar. Hal inilah yang sebenarnya harus kita optimalkan dan kita beri perhatian lebih. Peningkatan pertumbuhan perekonomian ini akan menciptakan kesejahteraan dan kemamkuran dalam sektor pariwisata yang dapat menghidupkan roda perekonomian.

Implementasi Sertifikasi Pariwisata di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sertifikasi adalah proses sukarela yang dikelola oleh suatu asosiasi atau organisasi profesional dan melibatkan standar kualitatif dalam suatu profesi tertentu. Dari definisi tersebut sertifikasi dapat dimaknai sebagai verifikasi atas keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan standarisasi tertentu. Sertifikasi Profesi banyak dilakukan oleh para pekerja untuk mendapatkan pengakuan formal. Dalam proses mendapatkan sertifikasi terdapat beberapa pertimbangan etika yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja. Hal ini mencakup moralitas, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi acuan standar tenaga kerja.

Di Indonesia sendiri terdapat payung hukum yang mengatur masalah sertifikasi pariwisata. Tepatnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Dimana dalam peraturan ini menyebutkan dua klasifikasi sertifikasi, yakni sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Dimana kedua sertifikasi tersebut ditujukan untuk peningkatan kompetensi baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasi oleh pekerja pariwisata. Dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan profesionalitas kerja itu sendiri.

Sertifikasi Kompetensi di tujukan terhadap tenaga kerja dalam industri pariwisata. Dimana sertifikasi ini merupakan pemberian sertifikan kompetensi dalam bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional. Sedangkan Sertifikasi Usaha Parisiwata adalah sertifikasi yangdiberikan kepada pelaku usaha dalam peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Dalam menjalankan sertifikasi tersebut ada peran Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Parisiwata (LSP Pariwisata).

Dimana LSP Pariwisata ini diberikat tugas dan fungsi sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi pariwisata berdasarkan lisensi dari undang-undang. Dalam hal ini pelaku usaha atau penguasaha pariwisata diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pariwisata. Kewajiban ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di bidang pariwisata tidaklah sembarangan orang, melainkan harus mendapatkan sertifikat kompetensi yang ia dapatkan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP tadi. Dimana dalam halam melaksanakan uji kompetensi tersebut terdapat standarisasi nasional yang harus dipenuhi untuk dapat

dikatakan profesional atau memiliki kemampuan dalam bidang kepariwisataan. Peningkatan kemampuan ini melalui sertifikasi ini haruslah ditingkatkan guna memicu sirkulasi perkembangan pariwisata.

Dalam konteks tenaga kerja di bidang pariwisata kita bisa melihat Tabel 1. Untuk memberikan gambaran perkembangan jumlah tenaga kerja dalam industri pariwisata.

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Tersertifikasi 2015-2018

Tahun	Tenaga Kerja Umum	Tenaga Kerja Tersertifikasi	Target Tenaga Kerja Tersertifikasi
2015	11.000.000	58.627	159.000
2016	11.400.000	17.500	200.000
2017	11.800.000	35.100	300.000
2018	12.000.000	65.000	400.000

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata 2018

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa pada tahun 2015-2018 ada kenaikan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi pariwisata. Meskipun pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan. Kemudian jika kita bandingkan dengan jumlah tenaga kerja umum yang belum tersertifikasi maka kita akan melihat bahwa perbandingannya jauh sekali. Ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata terus mengalami peningkatan. Namun pada pelaksanaan sertifikasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu pendekatan personal kepada tenaga kerja umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi pariwisata. Pendekatan personal ini lebih mengedepankan pemahaman secara intelektual dan emosional guna memberikan pencerahan kepada tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Padahal jumlah tenaga kerja umum yang begitu banyak dan aktif dalam menjalankan dalam industri pariwisata akan menimbulkan potensi penurunan wisatawan. Dikarenakan wisatawan akan merasa bahwa para tenaga kerja ini belum profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu dari segi pengawasan dan keamanan konsumen pun patut dipertanyakan. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 telah mengatur mengenai pengawasan. Dimana penyelenggaraan sertifikasi ini diawasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Menteri. Keterlibatan pemerintah dan lembaga pengawas ini lebih menunjukkan bahwa hasil uji kompetensi tersebut benar benar obyektif dan profesional.

Sistem pengawasan ini dilaksanakan secara berkala dan rutin. Dengan demikian hasil uji kompetensi dapat dipertanggungjawabkan. Pun dari segi wisatawan juga terlindungi hak haknya. Perlindungan keamanan terhadap wisatawan inilah yang harus diprioritaskan. Dimana apabila pelaku industri pariwisata melakukan hal hal diluar ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan wisatawan maka ada peran BNSP dan LSP Pariwisata itu sendiri yang dapat membekukan sertifikasinya dan tidak dapat melaksanakan profesinya dalam dunia pariwisata. Ini merupakan bentuk pertanggung jawaban serta perlindungan bagi wisatawan. Dengan demikian kepercayaan wisatawan akan meingkat dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan setiap tahunnya.

Pengaruh Sertifikasi Pariwisata Terhadap Peluang Kerja di Industri Pariwisata

Pada pemerintahan Joko Widodo pariwisata menjadi satu diantara prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia. Salah satu alasan pariwisata menjadi skala prioritas pemerintah adalah karena kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2018 sektor pariwisata menyerap 11, 17% dari total pekerja. Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya bahwa

pertumbuhan perekonomian dalam sektor pariwisata dapat menyumbang PDB Indonesia. Keterlibatan ini merupakan satu pertanda bahwa sertifikasi pariwisata memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dan peluang kerja di industri pariwisata. (Komarudi, 2021)

Penulis membagi dua klasifikasi pengaruh sertifikasi pariwisata terhadap peluang kerja di industri pariwisata, yakni pengaruh mikro dan pengaruh makro. Pertama, pengaruh mikro merupakan stimulus perbaikan secara internal terhadap tenaga kerja. Stimulus ini dalam kategori peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga kerja itu sendiri. Dimana adanya sertifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kemampuan dan pemahaman dalam dunia pariwisata. Ini bisa kita lihat dalam materi materi pengujian yang lebih spesifik terhadap sektor pariwisata tertentu dan jasa tenaga kerja tertentu. Dimana pengujian tersebut dilakukan secara obyektif dan transparan.

Pengaruh mikro ini akan memberikan daya tarik bagi wisatawan dengan kualitas tenaga kerja industri pariwisata di Indonesia. Dimana wisatawan mendapatkan pelayanan yang prima dengan rasa aman dan tenrtam karena adanya sertifikasi tersebut. Pengaruh mikro ini juga akan membentuk suatu intelektual community pariwisata. Dimana pemahaman intelektual mengenai dunia pariwisata akan memebentuk kelompok tenaga kerja yang handal secara intelektual. Semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi maka akan membentuk intelektual community yang berdaya saing internasional.

Kedua, pengaruh makro merupakan wujud dari pembentukan sistem industri pariwisata yang berkompeten. Dimana pengaruh makro ini memperbaiki tatanan sistem industri pariwisata, perbaikan sistem ini ada dikarenakan keterlibatan pemerintah melalui pembentukan BNSP dan LSP Pariwisata sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengaruh makro ini akan meciptakan sistem ekonomi yang berjalan secara sempurna. Baik dari segi awal produksi wisata sampai dengan mendapatkan profit dari industri tersebut. Keberadaan sertifikasi pariwisata ini dapat disebutk sebagai kunci dari roda perekonomian industri pariwisata itu sendiri.

Kedua pengaruh tersebut terbukti secara nyata mempengaruhi peluang tenaga kerja dalam industri pariwisata. Terlebih kita ketahui bahwa dewasa ini dengan hadirnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan adanya persaingan secara masif. Persaingan ini harus ditopang dengan peningkatan kualitas tenaga kerja pariwisata. Dengan adanya sertifikasi pariwisata ini tentu akan memberikan peluang yang terbuka lebar untuk para tenaga kerja dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam dunia pariwisata, khususnya di ASEAN. Namun kita juga harus memperhatikan ketersediaan LSP Pariwisata dalam memberikan pembekalan dan kompetensi terhadap banyaknya jumlah tenaga kerja pariwisata ini.

Dimana setidaknya saat ini sudah terdapat sekitar 23 LSP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam peningkatan keahlian tenaga kerja di Indonesia.

Tabel 2. Daftar Jumlah LSP di Indonesia

No	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi
1	LSP Pramuwisata Indonesia
2	LSP SPA Nasional
3	LSP COHESPA
4	LSP Jasa Boga
5	LSP Pariwisata Jakarta
6	LSP Hotel dan Restoran
7	LSP Pariwisata Indonesia
8	LSP Pariwisata Bali

No	Nama Lembaga Sertifikasi Profesi
9	LSP Pariwisata Bali Indonesia
10	LSP SPA Tirtanirwana Indonesia
11	LSP Pariwisata Bunaken
12	LSP Pariwisata Lancang Kuning Nusantara
13	LSP Crew Kapal Pesiar dan Kapal Niaga Internasional
14	LSP Anging Mamiri
15	LSP Phinisi
16	LSP MCE
17	LSP Wiyata Nusantara
18	LSP Pariwisata Nasional
19	LSP Pariwisata Bhakti Persada
20	LSP Archipelago
21	LSP Air Transport dan Distribution Agency
22	LSP Rafflesia
23	LSP Hotel dan Pariwisata

Tabel diatas menunjukkan bahwa sudah terdapa banyak LSP pariwisata di Indonesia. Dengan banyaknya LSP Pariwisata ini tentu haruslah dioptimalkan secara masif. Keberadaan ini juga merupakan wujud dari hadinya pemerintah untuk memberikan serta menginternalisasikan norma sertifikasi bertaraf internasilan yang dapat bersaing pada level domestik berbasis intelektual. Dimana menurut Cortel bahwa pemahaman intelektual harus ditopang melalui pemahaman retorika sebagaim medium yang paling dekat dengan masyarakat. Dimana penggunaan retorika ini dapat berpengaruh secara emosianl dan sosial khususnya terhadap para wisatawan.

Pada akhirnya kita bisa mengetahui bahwa adanya sertifikasi pariwisata ini ternyata memberikan dua pengaruh secara signifikan terhadap peluang tenaga kerja di sektor pariwisata. Pengaruh tersebut yakni pengaruh mikro dan pengaruh makro. Dimana pengaruh mikro ini berhubungan dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan pengaruh makro berhubungan dengan sistem industri pariwisata dalam peningkatan perekonomian.

SIMPULAN

Bahwa sektor indusrti pariwisata merupakan salah satu industri yang menyumbang besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Dimana dalam membangun pertumbuhan perekonomian tersebut maka ada peran pemerintah dalam mengupayakan kualitas dan perlindungan terhadap industri pariwisata itu sendiri. Baik dari segi pengusaha pariwisata, tenaga kerja, dan wisatawan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya sertifikasi pariwisata bagi pelaku industri pariwisata. Dimana sertifikasi pariwisata tersebut ternyata mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan tenaga kerja dalam industri pariwisata di Indonesia. Dimana pengaruh tersebut yakni pengaruh mikro dan pengaruh makro. Dimana pengaruh mikro ini berhubungan dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan pengaruh makro berhubungan dengan sistem industri pariwisata dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu perlu peningkatan dan pemahaman yang masif bagi pelaku industri pariwisata untuk lebih memahami pentingnya sertifikasi pariwisata ini. Dimana pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang masih bagi tenaga kerja umum dalam industri pariwisata yang belum tersertifikasi. Selain itu bagi pelaku usaha pariwisata juga harus terlibat aktif dalam kewajibanya untuk mewajibkan para pekerjanya untuk melakukan sertifikasi pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneldus. (2020). Pengaruh Sektor-Sektor . *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*,
- Frideman. (2020). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam yang berkelanjutan di Setu Cileunca. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*.
- Keliat. (2014). *Tenaga Kerja Terampil Indonesia : Liberalisasi Jasa ASEAN*. Yogyakarta: InsistPress.
- Komarudi, D. (2021). Peran Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Industri Pariwisata di SeaworldAncol. *Jurnal Master Pariwisata*.
- Lincolyn, A. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Nizal. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*,
- Nurnangtyas, D. (2021). Globalisasi dan Tenaga Kerja: Internalisasi Norma Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Transformasi Global*.
- Nuzulian. (2020). Diplomasi Indonesia Berbasis Program Cross Border Tourism dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Insignia Journal of Internasional Relation*
- Oktavia. (2019, Mei). *Eprint Undip*. Retrieved from eprint undip: http://eprints.undip.ac.id/29404/1/Jurnal_-_Analisis_Penyerapan_Tenaga_Kerja_di_Kota_Salatiga.pdf
- Rahmadhany, N. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Probinsi Bali Tahun 2015-2019 . *Jurnal Pendidikan Ekonomi Perkantoran dan Akutansi*
- Redata. (2021). Analisis Korelasi Pendampingan Komunitas terhadap Inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumen: Studi Kasus pada Komunitas Tangerang Berdaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kuliner Tangerang. *Business Management Journa*.
- Renata. (2019, Maret 21). *Indonesia.Go.Id*. Retrieved from <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia>
- Santoso, S. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berkonsep Kapasitas Inovasi Daerah di Desa Tanjungjaya. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 73.
- Spillane. (2019). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kanisius.
- Tobing, L. (2018, Februari 12). *Hukum Online*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>